

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepang adalah sebuah negara di Asia Timur yang terletak di suatu rantai kepulauan benua Asia di ujung barat Samudera Pasifik. Pulau-pulau paling besar adalah, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku dan Kyushu. Beberapa pulau-pulau kecil berada di dekat keempat pulau-pulau ini, termasuk sebuah kelompok pulau-pulau kecil yang berada di sebelah selatan di Okinawa. Jepang terletak di antara 126° BT – 146° BT dan 26° LU – 47° LU.¹ Topografi Jepang pada umumnya adalah bergunung-gunung pegunungan menduduki 71% dari luas daratan, rangkaian panjang pegunungan melintasi bagian tengah dari kepulauan ini dan membaginya menjadi dua bagian yaitu bagian sisi pasifik dan sisi laut Jepang. Banyaknya gunung di Jepang menyebabkan tanahnya tidak cocok untuk pertanian maupun industri. Hanya 20% tanah dari kepulauan ini yang sesuai digunakan untuk bercocok tanam.

Pelayaran di antara empat pulau terbesar itu sangat bergantung pada keadaan cuaca. Sungai di Jepang kecil, dangkal dan mengalir cepat serta dipenuhi dengan banyaknya batu-batu cadas. Banyaknya sungai pendek yang mengalir cepat digunakan sebagai waduk penyimpanan air untuk sawah dan pembangkit tenaga

¹ Beasley, W.G, 2001, *Pengalaman Jepang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 92

listrik. Di bagian hilir terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai jalur transportasi atau perhubungan. Keadaan alam Jepang yang demikian membuat sulit memerintah negara tersebut sebagai suatu kesatuan. Rintangan alam terhadap pemerintahan terpusat ini berhasil, karena adanya wibawa dari Raja serta diperkuatnya mitos bahwa dia adalah keturunan dewa.²

Penduduk sebagian besar homogen. Mereka sedikit sekali disentuh oleh imigrasi kecuali pada masa-masa awal pembentukan pemerintahan bakufu militer. Jepang adalah negara kepulauan yang terdiri dari 3.000 pulau dengan luas 173.786 mil persegi. Bahkan, keadaan pulau-pulau Jepang yang terhubung erat satu dengan yang lainnya telah memperbesar persatuan dan kesadaran nasional yang tinggi mengingat bahwa laut telah memisahkan negara Jepang dengan negara-negara lain di dunia lain. Perkembangan di Jepang sangat dipengaruhi oleh kesenian, ide dan lembaga serta kesustraan yang diimpor dari negara lain. Kedatangan agama Budha pada abad ke-6 dan ke-7 membawa pengetahuan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang bernuansa Cina dan Budha. Budhisme menjadi semacam alat yang membawa masuk kebudayaan Cina di negara tersebut.

Akibat masuknya kebudayaan Cina, banyak masyarakat Jepang yang lebih mengagumi kesenian daripada ilmu pemerintahan. Tentu saja karena banyaknya masyarakat Jepang yang terlena dengan keindahan kebudayaan Cina, kekuasaan ibukota atas tiap-tiap propinsi lambat laun semakin lemah. Pajak untuk membayar

² Reischauer, Edwin O, 1953, *Japan, Past and Present*, New York, hal . 12.

biaya istana dan pembangunan kuil Budha sangat besar dibandingkan dengan biaya pemasukan pemerintah yang tidak bertambah. Memasuki abad ke-11 Jepang dikatakan tidak berpemerintahan, walaupun Kaisar masih memegang pimpinan namun ia tak berkuasa dalam hal pengaturan pemerintahan. Karena dalam kenyataannya segala alur pemerintahan dipegang oleh para bangsawan yang berada di lingkungan sekitar istana..

Sejak saat itu negara Jepang yang semula memiliki bentuk pemerintahan terpusat dan didukung oleh birokrasi yang terdiri atas kaum bangsawan menuju negara yang bersifat feodal dimana format pemerintahan berdasarkan pada kepemilikan tanah.³ Mengingat saat itu kaisar selalu memberikan tanah kepada mereka yang telah berjasa dalam peperangan, ketika kondisi pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar mengalami kemunduran, mereka menggunakan tanah pemberian tersebut sebagai alat untuk menguasai wilayah yang satu dengan yang lainnya. Para pemilik tanah yang terbebas dari pajak itu semakin lama disibukkan oleh urusan mencari kelompok yang berada jauh di luar daerah mereka untuk diajak bergabung, hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan para tuan tanah untuk memperebutkan tanah-tanah pemberian kaisar.

Akibatnya di berbagai daerah bermunculan para kelompok-kelompok tuan tanah yang berpengaruh. Dimana hal ini menyebabkan para petani penggarap mengalami kerugian karena keberadaan mereka yang berada di bawah tuan tanah

³ Latourette, K.S., 1947, *The History of Japan*, New York Publishing, p.43.

dan harus membayar pajak yang tinggi kepada para penguasa feodal tersebut. Pada saat itu muncullah samurai yang merupakan wujud dari adanya feodalisme di Jepang. Mereka adalah orang suruhan dari para penguasa feodal. Sebagai pengawal tugas mereka adalah mengurus dan menjaga tanah keluarga dari serangan musuh. Untuk itu para pemilik tanah tersebut memberi imbalan tanah bagi para samurai tersebut. Memasuki tahun 1450 proses ini selesai. Jepang adalah kerajaan feodal, sama seperti Perancis dan Inggris pada abad pertengahan. Adanya bentuk suatu pemerintahan sistim feodal membuat segala urusan pemerintah memiliki sifat feodalisme.

Tentu saja hal ini berdampak pada keberadaan Samurai pada saat itu dimana ia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat awam lainnya dalam hal peperangan. Munculnya sistim Stratifikasi sosial pada masyarakat Jepang pada saat itu didominasi oleh Samurai yang semula hanya sebagai pengawal itu akhirnya menempati kelas pertama dalam urutan sistim stratifikasi sosial masyarakat Jepang pada saat itu. Kedudukan kedua kemudian ditempati oleh petani, yang dilanjutkan dengan pengrajin dan pedagang. Penetapan aturan ini dilakukan oleh Tokugawa dimana bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa⁴. Karena pada saat itu jumlah Samurai yang tak kurang dari 10% dari seluruh masyarakat Jepang sehingga dalam jumlah yang terlalu kecil itu kelas Samurai harus mamapu memerintah dan menguasai jumlah penduduk yang lebih banyak.

⁴ Fukutake Tadashi, *Masyarakat Pedesaan di Jepang*, PT Gramedia, 1989, Jakarta, hal 45

Masyarakat pada zaman Tokugawa dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah. Jumlah yang memerintah atau penguasa yaitu kelompok Bushi yang jumlahnya lebih kecil dari yang diperintahnya, merasa tidak aman hanya menggunakan senjata saja untuk mempertahankan kekuasaannya, pembagian kelas itu dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh secara turun temurun. Pembagian dan susunan kelas di dalam sistem kelas masyarakat Jepang pada saat itu berdasarkan fungsi atau kemanfaatan yang dimilikinyadalam kehidupan. Pada prakteknya sistem tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang terinci terhadap tingkah laku sehari-hari dari setiap kelas. Aturan-aturan tersebut menyangkut perbedaan penampilan pakaian, tutur kata, etiket, dan pemakaian pedang yang merupakan ciri khusus bagi kelas samurai.⁵

Tahun 1636 pemerintah Edo menetapkan peraturan bahwa untuk selanjutnya orang Jepang tidak boleh pergi keluar negeri sedangkan orang Jepang yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh pulang kembali ke Jepang. Pada saat itu, meskipun pemerintahan resmi berada di tangan kaisar di Kyoto, sesungguhnya kekuasaan berada di tangan para Shogun. Kekuasaan para Shogun semakin lama semakin meluas di Jepang dan mereka melakukan pelarangan hubungan antara Jepang dengan negara-negara lain. Tokugawa Ieyasu (1603-1867) adalah salah seorang Shogun yang mampu meredam gejolak politik melalui

⁵ Bennedict, Ruth, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni: Pola-Pola kebudayaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982, hal 38

sistem kelas pada masyarakat dan pengaruh asing dibendung dengan kebijakan menutup diri dari dunia luar. Sistem kelas tersebut dibentuk untuk mewujudkan stabilitas politik pada saat itu dan mempertahankan kekuasaan Tokugawa dari masyarakat lapisan bawah yang tidak setuju akan keberadaan dirinya sebagai Shogun dan ingin menumbangkan kekuasaannya. Banyaknya tuan tanah yang hanya mementingkan diri sendiri dan kurangnya pemasukan ke pemerintahan adalah salah satu sebab perekonomian Jepang pada saat itu terpuruk. Berbagai macam kebijakan yang telah dibuat oleh Tokugawa tersebut mulai menunjukkan titik terang. Pengangkutan dan komunikasi semakin baik memungkinkan barang yang berada di daerah terpencil dapat diperoleh di kota besar. Para petani kembali bekerja di sawah dan hasil pertanian pun meningkat.

Akibat kebijakan yang dimulai oleh Tokugawa tersebut pertumbuhan ekonomi Jepang melaju dengan cepat. Dengan kondisi seperti ini maka perbedaan antara kelompok-kelompok masyarakat semakin terlihat dengan jelas. Bagi mereka yang bekerja keras akan terlihat hasilnya dan bagi mereka yang malas ataupun miskin semakin tergilas. Semua tuan tanah memiliki Samurai sebagai anak buah, sebagian kecil dari Samurai tersebut memiliki tanah yang berasal dari pemberian tuan mereka masing-masing dan semakin berkembangnya daerah kekuasaan Tokagawa pada saat itu, Samurai telah berubah menjadi tuan tanah kecil di daerah milik Shogun, ketidakpuasan mereka terhadap system pembagian tanah yang dilakukan Tokugawa menyebabkan banyak terjadi pemberontakan. Tokugawa yang tidak menginginkan daerahnya terpecah meredam gejolak

masyarakat dan para Samurai ini melalui tekanan kepemilikan tanah. Pada saat itu Tokugawa mampu mengembalikan keadaan ekonomi yang kacau serta menyatukan sebagian besar wilayah Jepang.

Namun dua setengah abad yang tentram ini akhirnya koyak oleh kedatangan empat kapal perang Amerika yang merapat di Teluk Tokyo pada tanggal 8 Juli 1853.⁶ Melalui kekuatan militernya, Komodor Matthew C. Perry menuntut Jepang membuka pintu bagi Amerika pada tahun 1854, ia memaksa dibukanya Jepang kepada Barat melalui suatu Perjanjian. Terhadap tuntutan Amerika tersebut kalangan Bakufu dan Shogun mengalami suatu kebimbangan yang besar dan untuk pertama kalinya sejak 600 tahun pemerintahan Bakufu terbentuk, akhirnya mereka meminta pendapat kaisar Jepang di Kyoto. Namun setelah dilakukan pembicaraan, Komodor Perry berhasil membuat perjanjian dengan pemerintah Jepang pada tanggal 31 Maret 1854 yang kemudian dikenal sebagai perjanjian Kanagawa.⁷ Isi perjanjian tersebut di antaranya adalah Amerika berhak untuk mengangkat seorang konsul di daerah Shimoda dan dengan persetujuan tersebut Jepang mengatur dengan ketat perdagangan di kedua belah pihak. Setelah pembicaraan mengenai persetujuan selesai, sikap orang Jepang berubah, mereka yang semula memusuhi para pendatang tersebut dan bertekad untuk mengusir dari Jepang berubah menjadi ramah kepada para

⁶ Kedutaan Besar Jepang, 1984, *Jepang Sebuah Buku Saku*, Foreign Press Center of Japan, Jakarta, hal. 40

⁷ *Ibid*, hal. 41

pendatang dari Amerika bahkan orang Jepang tertarik dengan makanan serta pakaian ala Barat yang dibawa oleh Amerika.

Di pemerintahan Jepang sendiri mulai terlihat adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan Amerika serta perjanjian Kanagawa yang telah disepakati bersama itu, salah satunya adalah mereka yang tidak setuju dengan keberadaan Amerika di Jepang menuntut untuk menutup pintu bagi Barat dan menghapus segala perjanjian dengan orang asing dan mengusirnya keluar dari Jepang, kalangan istana dan kaisar termasuk dalam golongan ini. Maka hal inipun terjadi dengan para Samurai yang mengetahui bahwa ke-Shogunan dalam kondisi tejejit setelah adanya pembukaan diri Jepang terhadap Barat, mulai mengadakan pemberontakan yang berujung kepada Perang Boshin pada tahun 1867-1868. Tanggal 8 Desember 1868, kekuasaan militer Shogun di Jepang tumbang dan dimulailah reformasi di bidang sosial, politik, dan budaya di negara Jepang.

Pada tahun 1868, Pangeran Mutsuhito diangkat menjadi kaisar dan memilih nama Meiji yang artinya pemerintahan yang tercerahkan. Meiji memilih nama tersebut dengan harapan Jepang mampu keluar menjadi Negara Maju setelah pemerintahan Isolasi yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa Ieyasu.. Meiji kemudian menumbangkan kekuasaan Shogun dan menggantikannya dengan administrasi kerajaan.⁸ Pihak ke-Shogunan akhirnya mundur dan Restorasi Meiji mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar. Era Meiji mengawali era reformasi

⁸ www.sjsv.edu/faculty/watkins/meiji.htm_9k, 18 November 2005

dari sistem feodal ke sistem modern. Menurut Meiji arti reformasi bagi Jepang adalah menggabungkan struktur pemerintahan dan militer dari Barat dengan industri modern serta ideologi tradisional dan perubahan sosial yang sesedikit mungkin. Modernisasi ditinjau dari segi pencerahan pemikiran adalah kesadaran akan adanya serba keterbelakangan akibat terkungkungnya kebebasan berpikir, bertindak, dan berpendapat sebagian besar lapisan masyarakat sebagai akibat ketatnya pranata-pranata dan aturan-aturan yang bersifat hierarkis dan diskriminatif. Meiji mengawali pembaharuannya mulai dari memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo dan melakukan berbagai reformasi dimana terjadi perubahan yang luar biasa cepatnya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.⁹ Di bidang politik, pemerintahan Jepang saat itu lebih mengutamakan terciptanya stabilitas dalam negeri dan melaksanakan sistem pemerintahan yang lebih mementingkan persatuan nasional dan stabilitas nasional. Dalam rangka memperbaiki sektor keuangan dan kondisi keuangan negara, pemerintah kerajaan Jepang membangun industri modern melalui industri tekstil dan pembentukan kartel (yang dikuasai oleh kelompok zaibatsu).¹⁰ Di bidang kebudayaan telah terjadi pula pergeseran apresiasi masyarakat dimana lebih memandang tinggi status mereka yang memiliki dan menguasai pengetahuan falsafah Barat dan yang memperoleh pendidikan di Barat. Bahkan, banyak hal dalam kehidupan protokuler maupun sehari-hari di Jepang yang

⁹ www.japaneselifestyle.com.au/culture/samurai.html.28k, 24 November 2005

¹⁰ Irsan Abdul, *JEPANG: politik Domestik, Global dan Regional*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hal 55

meniru kebiasaan Barat seperti dalam berpakaian pada acara kebesaran di lingkungan pemerintahan dan kekaisaran.

Modernisasi Jepang di zaman Meiji membawa pengaruh yang cukup luas dalam tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat Jepang. Peranan dan kekuasaan Daimyo sebagai penguasa (*landlords*) wilayah tertentu mulai dihapuskan tetapi posisi mereka masih diakui dan dianugerahi gelar bangsawan. Dibidang kebudayaan muncul kecenderungan di dalam negeri untuk tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang dirasakan mulai luntur akibat budaya asing yang semakin meluas. Jepang dalam hal ini mampu memadukan suatu kebiasaan baru yang tetap menghormati tradisi lama dan di pihak lain tetap mengikuti pola modernisasi yang berdasarkan kebiasaan budaya Barat.

B. Pokok Permasalahan

Bagaimana peran individu Samurai setelah adanya penghapusan kelas Samurai oleh Pemerintahan Meiji?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Memakai suatu formulasi permasalahan dengan teori elite dan sumber kekuasaan untuk menjelaskan permasalahan di atas.

1. Teori Elit

Ada beberapa definisi dari para ilmuwan sosial untuk menjelaskan tentang elite, yaitu Vilfredo Pareto dan Roberto Michels. Pareto mendefinisikan elite sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas untuk

memperoleh kekuasaan sosial dan politik, merupakan yang terbaik, berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Umumnya berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya, pandai, berkarakter moral dan sebagainya.¹¹

Menurut Pareto masyarakat terdiri dari 2 kelas (1) lapisan atas, yaitu: elite, yang terbagi ke dalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah yaitu non elite. Revolusi dan kekerasan yang merupakan ciri khas elite untuk mempertahankan kekuasaannya.¹² Pareto juga mengemukakan azas-azas umum tentang elite, yaitu: (1) kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya didistribusikan tidak merata, (2) pada hakekatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuatan politik dan mereka yang tidak memilikinya, (3) secara internal elite itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok (4) elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (*self perpetuating*) dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas (*exclusive*), (5) kelompok itu bersifat otonom kebal akan gugatan siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.¹³

¹¹ Vilfredo Pareto, *The Mind and Society*, 4 vols, dalam Arthur Livingstone, ed., (New York, Harcourt Brace: 1939), hal. 1420.

¹² *Ibid*, hal. 1431

¹³ Mas'ood Mohtar Collin Mc. Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 78-79.

Kelompok elit pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok itu. Elit dapat diartikan dengan "sejumlah kecil orang (biasanya kurang dari 5% dari penduduk) yang memiliki paling tidak satu nilai dasar dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari pada rata-rata penduduk umumnya".¹⁴

Di dalam kelompok penguasa (*the Rulling Class*) selain ada elit yang berkuasa (*the Rulling Elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui media massa jika elit kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Maka dalam hal ini, massa memegang sejenis kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa. Samurai yang merupakan kelompok kelas sosial masyarakat Jepang ternyata mampu menduduki posisi untuk memerintah, walaupun posisi pemerintahan seharusnya dipegang oleh Kaisar sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi di Jepang. Sedangkan yang mendorong Samurai berkedudukan sebagai elit dimana ia memiliki posisi untuk memerintah adalah karena senantiasa adanya dorongan kemanusiaan dari kelas ini yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Yang termasuk di dalam kelas Samurai semua anggota keturunan keluarga Samurai, dari keluarga pembesar, pemimpin perang, sampai anggota keluarga yang berasal dari Samurai miskin, sehingga di dalam kelas Samurai ada perbedaan tingkat sosial.

¹⁴ Karl W Deutsch, *The Analysis of International Politics*, (Engelwood Cliff, N J Prentice-Hall, 1968), hal 62

Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu. Keberadaan Samurai sebagai kelas yang minoritas pada saat itu mampu mengendalikan kelompok mayoritas, dimana kekuasaan terbesar dipegang oleh para Bangsawan pemilik modal. Hingga suatu saat ia mampu menggeser posisi bangsawan sebagai penguasa Jepang dan menetapkan aturan-aturan yang mereka buat sendiri untuk kemudian diterapkan kepada masyarakat Jepang. Samurai adalah kelas yang memiliki pengaruh besar dalam bidang yang kecil ruang lingkungannya akan tetapi dalam hal pemutusan kebijaksanaan memiliki pengaruh yang besar.

2. Konsep Power

Kata *power* sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang karena kata tersebut merupakan perbendaharaan yang dimiliki oleh umum dan sering dipergunakan sebab-sebab yang berada dibalik kejadian. *Power* merupakan suatu konsep yang bisa diterapkan baik terhadap gejala fisik maupun kepada manusia sehingga konsep power memegang peranan penting dalam teori politik.

Menurut Hans Morgenthau, dia mendefinisikan konsep *power* sebagai suatu hubungan antara dua actor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk

mengendalikan pikiran dan tindakan actor B¹⁵. jadi *power* menurut Morgenthau adalah:

Bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain¹⁶

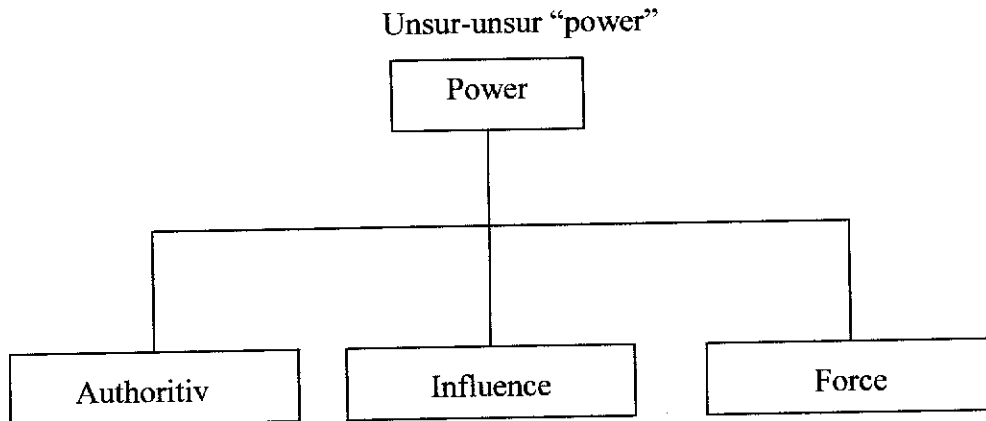
Selain itu konsep *power* memiliki definisi lainnya seperti yang diajukan oleh Coulombis dan Wolfe dimana mereka mendefinisikan *power* secara luas. Di sini *power* merujuk pada apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian actor A terhadap actor B. dalam hal ini *power* bisa dilihat sebagai memiliki tiga unsure penting. *Pertama*, adalah “daya paksa” (*force*), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh actor A terhadap actor B demi mencapai tujuan politik A. *Unsur kedua*, adalah pengaruh (*influence*), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan actor A. *Unsur ketiga*, wewenang (*authority*) yaitu sikap tunduk suka rela actor B pada arahan (nasihat, perintah) yang diberikan oleh aktor A, sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang,

¹⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional (disiplin dan Metodologi)*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 117

¹⁶ *Ibid*, hal 117

kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian, konsep power bisa digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1



Pembedaan lain yang harus diperhatikan adalah kekuasaan sebagai "tujuan" dan kekuasaan sebagai "sarana". Kekuasaan sebagai "sarana" artinya kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain adalah sarana untuk mencapai tujuan lain, yang mungkin lebih tinggi atau berjangka lebih panjang. Kalau tujuan jangka panjang itu meliputi nilai-nilai seperti perdamaian, keamanan, kemajuan nasional, pembangunan ekonomi, penyebaran demokrasi, maka power dianggap penting sebagai "mata uang" untuk "membeli" nilai-nilai itu

Coulombis dan Wolfe menekankan bahwa power tidak bisa dipandang sebagai hubungan yang static, berlangsung satu kali dan satu arah. Power harus dilihat sebagai hubungan yang dinamis, berlangsung terus-menerus, dan dua arah. Misalnya, kalau hari ini A mengendalikan perilaku B dalam satu isyu, tiga bulan

atau tiga tahun lagi perimbangan kekuatan itu bisa berubah sehingga B bisa mengendalikan perilaku A dalam isyu yang sama.¹⁷

Karena itu seperti kita ketahui bersama bahwa keberadaan Samurai pada saat itu memiliki posisi yang penting di dalam sistim politik pemerintahan Jepang. Karena kadang-kadang konsep kemampuan (capability) diterapkan oleh ilmuwan sebagai sinonim dari power dan Coulombis dan wolfe membedakan konsep power dan kapabilitas yang didefinisikan sebagai atribut-atribut yang tampak nyata (tangible) maupun yang tidak tampak (untangible).

Unsur tangible antara lain : kekuatan/kemampuan militer, jumlah dan kualitas penduduk serta penyebarannya, kekuatan ekonomi dan industri, kekayaan alam dan kondisi geografis. Sedangkan unsur-unsur untangible antara alain : aliansi persekutuan militer, politik, ekonomi, penguasaan system informasi, moral, kualitas pemerintahannya, kemampuan ilmu dan teknologi, keahlian diplomasi, keahlian dalam perdagangan internasional, kemampuan untuk menjaga stabilitas politik dan sebagainya. Namun penulis sengaja tidak menerangkan secara keseluruhan unsur-unsur tersebut.

Samurai memiliki unsur tangible yang sangat menonjol yaitu kekuatan/kekuasaan militer, dimana kekuatan/kekuasaan militer ini memiliki peran yang sangat besar dalam keberadaan Samurai. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Samurai ini ia mamapu menerapkan segala aturan agar tetap memiliki posisi yang menguntungkan dan bertahan sebagaikelas penguasa. Kelas

¹⁷ *Ibid* hal 119

samurai merupakan kelas tertinggi dalam pemerintahan Tokugawa. Sesuai dengan statusnya sebagai Samurai maka mereka berperan besar dalam upaya menegakkan dan memelihara perdamaian serta pertahanan Negara. Samurai memiliki kekuasaan dimana ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seluruh masyarakat Jepang pada saat itu atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari Samurai sebagai kelas penguasa pada saat itu. Kekuasaan yang dimiliki oleh Samuragi tidak hanya di bidang politik, akan tetapi di bidang sosial juga. Dimana Samurai menguasai hampir setiap lini kehidupan masyarakat Jepang pada saat itu, diantaranya adalah kekuasaan di bidang Sosial dimana Samurai mampu membuat keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses yang menghasilkan suatu kepatuhan dari pihak lain untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Samurai. Kekuasaan yang dimiliki Samurai sebagai kelas Penguasa pada saat itu bertujuan untuk mempertahankan kelas Samurai sebagai kelas penguasa. Sehingga segala hal dilakukan Samurai untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, diantaranya adalah melalui pembentukan kelas dalam sistem stratifikasi masyarakat Jepang pada saat itu.

D. Hipotesa

Berdasarkan teori serta latar belakang di atas, walaupun pemerintahan Meiji telah menghapuskan kelas Samurai di dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat Jepang, akan tetapi individu-individu Samurai masih tetap aktif

memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara Jepang di masa Pemerintahan Meiji.

E. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui peran apa saja yang dibawa Samurai ketika modernisasi yang dilakukan pemerintahan Meiji.
2. Mengetahui tentang keberadaan Samurai sebagai salah satu dari bagian sejarah Jepang.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan yaitu buku-buku ataupun majalah, media massa termasuk internet dan literature lain yang sesuai.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak menjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batas-batas kajian, maka otomatis akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kekaburan wilayah persoalan. Untuk itu penulis mencoba membatasi permasalahan pada peran Samurai pada masa pemerintahan Meiji (1868-1912).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Samurai mulai dan sebab awal kemunculan Samurai pertama kali di Jepang
- BAB III : Merupakan penjelasan tentang keberadaan Meiji dan langkah modernisasi yang telah dilakukan untuk kemajuan Jepang
- BAB IV : Bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Meiji terhadap Samurai
- BAB V : Merupakan kesimpulan dari keseluruhan tulisan dari bab-bab sebelumnya